

**Kinerja Keuangan di Masa Pandemi Covid 19  
(Studi di 4 wilayah Kabupaten Kota di Papua)**

Junaedy<sup>1</sup>, Agnes Deti Manggalla<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia  
jun\_aedy@kemenag.go.id

---

**Informasi Artikel**

Catatan Artikel:  
Diterima 2 Maret 2023  
Revisi disetujui 30 Maret 2023  
Dipublikasi 31 Mei 2023  
Kata kunci: Kinerja, Keuangan,  
Efektivitas, Covid-19

DOI:  
10.55098/vrja.v1i2.380

---

**Abstrak**

Kinerja keuangan merupakan hal penting untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam melakukan program dan kegiatannya. Hal ini akan menjadi tolok ukur kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam memberikan manfaat keberadaannya. Oleh karena itu, kinerja keuangan perlu dianalisis sebagai bahan pertimbangan keputusan organisasi khususnya pada saat terjadi pandemic covid-19. Penelitian ini akan menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan sebelum dan masa pandemic covid-19 dengan menggunakan ukuran rasio efektivitas. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode archival dengan studi dokumentasi. Sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *non probability sampling* sebanyak 8 (delapan) sampel yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan kota di wilayah Papua. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis sampel berpasangan (*paired sampel test*). Hasil temuan penelitian ini menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas pemerintah daerah di Papua yang mencakup Kabupaten Sarmi, Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura baik sebelum dan masa pandemic covid-19

---

**Pendahuluan**

Penelitian ini menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan di 4 (empat) wilayah kabupaten dan kota di Papua sebelum dan masa pandemic covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah mengubah tatanan hidup masyarakat dan juga kinerja baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah daerah. Papua sebagai wilayah yang memiliki kondisi geografis dan akses yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Indonesia juga mengalami hal yang sama dengan daerah lainnya. Kondisi tata kelola keuangan menjadi fenomena yang unik selain kondisi kesehatan masyarakat karena aktifitas perekonomian lebih dominan dipengaruhi oleh distribusi anggaran dari pemerintahan daerah. Kondisi pertumbuhan pendapatan selama periode 2018 – 2021 menjadi indikasi adanya permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal dari daerah tersebut. Pandemi covid yang terjadi di bulan Pebruari 2019 telah memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi semua aspek kehidupan.

Beberapa penelitian terdahulu menghubungkan dampak pandemic covid-19 dengan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio desentralisasi fiskal (Wa Ariadi dan Jatmika,

2021), rasio kemandirian (Cahyadi, 2021), dan efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD serta rasio belanja modal (Fitri Rahmawati, 2022; Risnawati et al., 2022). Wa Ariadi dan Jatmika (2021) menjelaskan kinerja keuangan di pemerintah Provinsi Papua berdasarkan rasio desentralisasi fiskal sangat kurang, sedangkan kemandirian keuangan menunjukkan tingkat kemandirian yang relatif sedang. Cahyadi (2021) bahkan dalam penelitiannya di Kabupaten Lombok menemukan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali terutama dalam masa pandemic Covid-19. Rata-rata rasio efektivitas dan efisiensinya juga tergolong cukup efektif dan efisien.

Penelitian terdahulu menjelaskan kinerja keuangan diukur dengan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dan rasio belanja modal. Penelitian tersebut umumnya dilakukan dalam kondisi sebelum terjadinya pandemic covid-19. Peneliti belum menemukan dalam beberapa literatur pengujian dan analisis terhadap variabel kinerja keuangan pada 4 (empat) wilayah kabupaten dan kota di wilayah Papua. Pengujian variabel kinerja keuangan pada obyek tersebut akan memberikan wawasan baru sejauhmana dampak pandemic Covid-19 pada aspek implementasi anggaran pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan unit analisis organisasi pemerintah daerah di wilayah Papua. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sebelum dan saat terjadinya pandemic covid-19. Analisis sampel yang digunakan menggunakan sampel data *times series* 2 (dua) tahun sebelum (2018-2019) dan saat terjadi penyebaran covid-19 (2020-2021). Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan efektivitas sebelum dan saat terjadinya pandemic covid-19 relatif stabil. Namun demikian, hasil uji beda dari kedua kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan sebelum pandemic relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi kinerja keuangan saat pandemic.

Penelitian ini disusun meliputi bagian pertama pendahuluan, bagian kedua tinjauan pustaka dan hipotesis yang didukung dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, bagian ketiga menyajikan data dan metodologi, statistika deskripsi variabel penelitian. Bagian keempat, menyajikan hasil dan pembahasan serta kesimpulan penelitiannya dibagian akhir.

### **Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

Literatur akuntansi yang mengkaji kinerja keuangan dan pengukurannya telah dianalisis oleh sejumlah peneliti terdahulu baik di perusahaan swasta maupun di lembaga pemerintah daerah. Efektivitas dalam beberapa literatur dijelaskan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Indra, 2014). Haryanto (2014) menjelaskan efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan hasil pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan. Operasional dalam organisasi dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2018) dan efektifitas juga terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (Mahmudi, 2015).

Beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji dan menganalisis kinerja keuangan sebelum dan setelah adanya pandemic Covid-19 menemukan adanya perbedaan signifikan (Fitri Rahmawati, 2022). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi rasio efektivitas PAD, kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dan belanja modal. Sementara itu, kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, dan kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan baik sebelum dan selama Covid-19. Kondisi kinerja keuangan menunjukkan hasil yang sedang ketika diukur dengan rasio kemandirian (Wa Ariadi, 2021). Selain itu, indeks kemampuan belanja rutin juga menunjukkan proporsi masih dibawah 20%

dari total belanja dan total Anggaran di Provinsi Papua. Sementara itu, proporsi perkembangan untuk belanja rutin di tahun 2020 cukup signifikan dan mengalami peningkatan di masa pandemi.

Sebelum terjadinya pandemic covid-19 kinerja keuangan yang diukur dengan rasio desentralisasi fiskal juga belum sepenuhnya mandiri. Namun demikian, efektivitas Pendapatan Asli Daerah sangat efektif (Dani Melmambessy, 2022). Kinerja keuangan daerah secara umum masih tergolong rendah, ketika diuji dari beberapa rasio keuangan (Chevin Aditya Cahyadi, 2022). Pelaksanaan kinerja keuangan daerah tersebut menemui beberapa faktor penghambat sehingga menjadi suatu kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan efisiensi PAD dan optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi asli daerah yang ada, serta peningkatan dan pengembangan kualitas SDM.

Berdasarkan beberapa hasil riset yang telah dilakukan tentang efisien dan efektivitas (Fathiyah, 2019) dan pengukuran kinerja keuangan lainnya (Fitri Rahmawati, 2022), maka hipotesis penelitian ini:

**H1: Ada perbedaan signifikan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas sebelum dan masa pandemic Covid-19**

### Metoda Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif explanatory dengan metode archival. Peneliti melakukan studi literatur dengan menetapkan unit analisis yang digunakan adalah organisasi pemerintah daerah di 4 (empat) wilayah Kabupaten Kota di Papua. Penelitian ini menggunakan pengukuran efektivitas dengan membagi data realisasi dan target pendapatan asli daerah selama periode pelaporan 2019-2022. Pengumpulan data kinerja keuangan diperoleh melalui studi dokumentasi dari laporan anggaran pendapatan belanja daerah 4 (empat) kabupaten dan kota, sehingga diperoleh 8 sampel. Sampel diobservasi pada dua kondisi yaitu sebelum pandemi (2018–2019) dan saat terjadinya pandemi (2020–2021). Variabel yang diamati adalah kinerja keuangan yang mencakup perhitungan efektivitas. Variabel ini akan dibandingkan pada kondisi efektivitas sebelum pandemi dan saat pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat perlakuan tertentu terhadap suatu variabel kemudian mengobservasi efeknya. Desain penelitian yang digunakan adalah *pre* dan *during test*. Langkah-langkah proses pengumpulan data pada percobaan ini sebagai berikut: 1) Data *pre* dikumpulkan sebelum terjadinya wabah virus Corona (Covid-19) dimana aktifitas pemerintah dilakukan dalam keadaan normal (*offline*); 2) Data *during test* dikumpulkan saat terjadinya wabah virus Corona (Covid-19) dimana proses aktifitas pemerintah dilakukan dalam keadaan tidak normal (*work from home*), dengan memanfaatkan bantuan teknologi informasi melalui jejaring internet. Selanjutnya data *pretest* dan *posttest* akan dianalisis menggunakan uji t sampel berpasangan dengan bantuan software SPSS.

**Tabel 1**  
**Deskripsi Statistika**

	Kota Jayapura	Kabupaten Keerom	Kabupaten Jayapura	Kabupaten Sarmi
Rata-rata	98.7750	92.6500	136.6500	78.1250
Nilai terendah	71.30	59.00	114.70	55.00
Nilai tertinggi	130.80	140.80	166.70	89.60

Tabel 1 menyajikan statistika deskripsi dari variabel yang diuji. Unit analisisnya adalah 4 kabupaten dan kota di Papua. ES merupakan efektivitas sebelum pandemic covid-19 dan EP adalah efektivitas saat pandemic covid-19

**Tabel 2**  
**Efektivitas Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi**

	Sampel	Rata-rata	Nilai Tertinggi	Nilai terendah	Deviasi Standar
Sebelum Pandemi (ES)	8	113,46	166,74	79,10	31,73
Saat pandemi (EP)	8	89,63	140,73	55,00	29,17

Sumber: Hasil olah SPSS, 2023

Rata-rata kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas sebelum dan masa pandemic covid-19 tertinggi dicapai Kabupaten Jayapura yaitu sebesar 136,65 diikuti Kota Jayapura (98,77), Kabupaten Keerom (92,65) dan Kabupaten Sarmi (78,12). Sementara itu, rata-rata efektivitas sebelum (113,46) dan masa pada pandemic covid-19 (89,46) di 4 (empat) wilayah di Kabupaten dan Kota Jayapura terjadi penurunan. Kondisi ini bahkan ditunjukkan pada nilai penyimpangan (31,73) efektivitas sebelum terjadi pandemic covid-19 dan saat pandemic covid-19 (29,17).

### Metoda

Metoda analisis penelitian ini menggunakan analisis uji t sampel berpasangan (*paired sampel t-test*). Analisis uji t sampel berpasangan (*paired sampel t-test*) diawali dengan pengujian normalitas data untuk memastikan data bahwa berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$ . Selanjutnya, uji t sampel berpasangan yang merupakan pengujian dua kelompok sampel saling berhubungan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus data yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) mendapat dua buah perlakuan yang berbeda. Meski menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Hipotesis dari kasus ini dapat ditulis:

$$H_0 = \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 = \mu_1 \neq \mu_2$$

Makna dari hipotesis alternatif ( $H_1$ ) di atas adalah bahwa ada perbedaan rata-rata hasil pengamatan pada kedua perlakuan sedangkan ( $H_0$ ) berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil pengamatan. Statistik uji yang digunakan untuk melakukan uji t sampel berpasangan ini adalah:

$$t = \frac{\bar{D}}{\left(\frac{SD}{\sqrt{n}}\right)}$$

Sumber: Montolalu, & Langi (2018)

Keterangan:

SD=  $\sqrt{\text{variansi}}$

t= nilai t hitung

= rata-rata selisih perlakuan 1 dan 2

SD= standar deviasi selisih perlakuan 1 dan 2

n= jumlah sampel

Interpretasi dari hasil uji t sampel berpasangan ditentukan dengan perbandingan nilai signifikansinya. Jika nilai sig > 0,05, berarti  $H_0$  diterima artinya tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kedua perlakuan sedangkan jika sig < 0,05, maka  $H_0$  ditolak, artinya ada perbedaan signifikan antara rata-rata kedua perlakuan. Kabupaten dan kota di 4 wilayah Papua sebelum dan sesudah pandemic covid-19 tidak memiliki kinerja keuangan (efektivitas) yang berbeda.

**Hasil dan Pembahasan**

Hasil uji analisis menggunakan data *times series* periode 2019-2022. Kinerja keuangan sebelum dan saat terjadinya pandemic covid-19 diuji menggunakan analisis uji beda (*t-test*). Analisis uji beda sebelum dilakukan didahului dengan pengujian normalitas data untuk memperoleh kondisi data yang berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal kemudian dianalisis dengan membandingkan 2 (dua) kondisi untuk mendapatkan hasil yang komprehensif tentang kinerja keuangan pada sampel kabupaten dan kota Jayapura yang berada di wilayah Papua. Hasil analisis uji normalitas dan uji beda disajikan dalam tabel 3 dan tabel 4 yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan sama sebelum dan saat pandemic covid-19.

**Tabel 3**  
**Hasil uji Normalitas**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Statistic	Df	Sig.
Sebelum Pandemi	.270	8	.089
Setelah Pandemi	.117	8	.200*

Sumber: Hasil olah SPSS, 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data sampel penelitian sebelum pandemic covid-19 (0,089) dan masa pandemic covid-19 (0,200). Hal ini berarti bahwa data sampel penelitian berdistribusi normal dan selanjutnya dapat dilakukan uji beda (*t-test*) berpasangan.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Sampel Berpasangan**

<b>Kabupaten Sarmi</b>									
Paired Differences									
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Pandemi-Masa Pandemi	17.92500	48.27418	34.13500	-415.80130	451.65130	.525	1	.692
<b>Kota Jayapura</b>									
Paired Differences									
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Pandemi-Masa Pandemi	23.21000	51.20867	36.21000	-436.88167	483.30167	.641	1	.637

		Kabupaten Jayapura					t	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Pandemi - Masa Pandemi	19.51000	16.50387	11.67000	-128.77141	167.79141	1.672	1	.343

  

		Kabupaten Keerom					t	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Pandemi - Masa Pandemi	34.60500	20.54145	14.52500	-149.95262	219.16262	2.382	1	.253

Sumber: Hasil olah SPSS, 2023

Tabel 4 menunjukkan hasil uji t sampel berpasangan dimana diperoleh nilai signifikansi dari kinerja keuangan dari 4 (empat) wilayah Kabupaten dan Kota di Papua (Sarmi, Kota Jayapura, Jayapura, Keerom) diatas nilai signifikansi 5%. Syarat uji hipotesis bahwa hipotesis awal (H<sub>0</sub>) ditolak jika nilai probabilitas atau tingkat signifikansi >5%. Nilai hasil uji beda yang ditunjukkan dari keempat wilayah di Papua diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0,05, masing Kabupaten Sarmi (0,692), Kota Jayapura (0,637) Kabupaten Jayapura (0,343), dan Kabupaten Keerom (0,253). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan kinerja keuangan sebelum dan masa pandemic covid-19 yang diukur dengan rasio efektivitas tersebut ditolak. Penolakan H<sub>0</sub> mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kinerja keuangan saat sebelum terjadinya wabah virus corona dengan saat terjadinya wabah virus covid-19. Walaupun ada penurunan dari segi nilai nominal realisasi pendapatan asli daerah namun penurunannya tidaklah signifikan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pandemic covid-19 merupakan kondisi yang mempengaruhi implementasi program dan kegiatan pemerintah daerah namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis data yang ditampilkan pada tabel 4, diketahui bahwa nilai rata-rata kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas sebelum dan masa pandemic covid-19 menunjukkan bahwa Kabupaten Keerom lebih efektif kinerja keuangannya dibandingkan 3 (tiga) kabupaten lainnya. Turunnya nilai efektivitas pemerintah daerah dapat disebabkan karena terjadinya adaptasi dalam proses aktivitas perangkat daerah yang berdampak pada optimalisasi aktivitas. Pegawai pemerintah daerah juga cenderung mengalami *culture shock* karena bersentuhan dengan keadaan abnormal. *Culture shock* yang dialami pegawai selama proses menjalankan program dan kegiatannya terutama berkaitan dengan metoda kerja dari model konvensional kepada penggunaan teknologi informasi. Pegawai yang terkendala bekerja secara *online* tidak sedikit karena keterbatasan pengetahuan maupun fasilitas pendukung pekerjaan yang dimiliki.

## Kesimpulan

Penelitian ini menguji dan menganalisis apakah ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat covid-19 di 4 wilayah kabupaten kota di Papua yang meliputi Kab. Sarmi, Kab. Keerom, Kab. Jayapura, dan Kota Jayapura. Pertama, penelitian ini menggunakan analisis uji beda pada data times series dari 8 sampel penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas sebelum dan saat pandemic covid-19 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah daerah yang memiliki

tingkat efektivitas lebih baik walaupun belum dikategorikan efektif adalah Kabupaten Keerom dibandingkan dengan Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Sarmi. Pemerintah daerah cenderung kesulitan dalam mengatur tata kelola keuangan saat pandemic covid-19 karena terjadi pergeseran ataupun perubahan program dan kegiatan yang harus diimplementasikan.

Kontribusi dari penelitian ini terutama bagi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua bahwa adanya kondisi wabah (abnormal) yang terjadi meskipun dapat merubah tata kelola keuangan namun tidak semestinya disikapi secara berlebihan. Pemerintah dapat mengubah metoda kerja yang mengarah pada pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mencapai tingkat efektivitasnya. Penelitian ini juga memperluas pengujian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) dalam hal efektivitas PAD. Dengan demikian, pandemic covid-19 telah mampu mengubah tatanan tata keuangan di pemerintah daerah namun tidaklah signifikan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena sampel yang digunakan hanya terdiri dari 4 unit analisis. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah unit analisis pada daerah kabupaten lain di Papua sehingga akan memberikan gambaran yang lebih luas.

## Daftar Pustaka

- Alvini, Y. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011-2016). *JOM FEB*, 1 (1), hal.1-15.
- Andirfa, M., Basri, H., dan M. Shabri A. Majid. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5 (3), hal.30-38.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2).
- Aulia, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- Ayinde, Kayode, John Kuranga, dan Adewale F. Lukman. 2015. Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 5, No. 6, h. 858–867.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *EKSIS Universitas Islam Majapahit Mojokerto*. ISSN: 1907-7513, 11(1).
- Astiti, Desak Nyoman Yulia dan Ni Putu Sri Harta Mimba. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, No. 3, h. 1924–1950.
- Bungin, B. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Refika Aditama
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah- Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.

- Harumiati, Y & Payamta. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2), 75-87.
- Ilmiyyah., Nyanyu Miftahul dan Evada Dewata. (2017). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun (2012)-(2015). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5 (1), hal.147-162.
- Lathifa, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.
- Maiyora, Gita., Yusralini, dan Riska Natariasari. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/ Kota Di Pulau Sumatera). *Jom FEKOM*, 2 (2), hal.1-15.
- Mardiasmo. (2011). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Ed.2 Yogyakarta: Andi Offset.
- Maulina, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. Vol. 5 No.2 Mei 2021.
- Mohammed, Abba, Bawa Bello Ahmed, dan Aliyu Modibbo Salihu. (2015). Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *Journal of Arts, Science & Commerce*, Vol. 6, No. 3, h. 67–77.
- Mulyani, S., & Wibowo H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15 (1), 57–66.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prataningrum (2012), *Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2008 – 2010*. <http://www.ui.co.id>.
- Puspitasari, Ni Luh Putu Lindri, Made Pradana Adiputra, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1, h. 1–10.
- Rondonuwu, R H., Jantje J. T., & Budiarmo N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3 (4), 23-32.

- Sari N. M D. P (2019) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8 (8), 4759-4787.
- Sarti B. I (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- Sekaran, U. & Roger, B. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis pendekatan Pengembangan keahlian*. Edisi 6. Buku 1. Cetakan Kedua, Salemba Medika, Jakarta Selatan.
- Mustanda, I Ketut dan Ni Made Diah Permata Sari. (2019). “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *E-Jurnal Manajemen*. 8 (8): 4759-4787.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.